

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Pers Nasional: Dari Masa Perjuangan sampai Sistem Konglomerasi

Perkembangan pers dari masa ke masa menjadi panduan penulis untuk menunjukkan bukti bagaimana awal mula berkembangnya pers di Indonesia. Penulis membuat skema pemetaan pers di Indonesia, dimulai dari Pers Prakemerdekaan, Pers Pemerintahan Orde Lama, Pers Pemerintahan Orde Baru dan Pers di Era Reformasi. Pers di masa prakemerdekaan dijadikan sebuah alat pergerakan perlawanan untuk melawan penjajah, sebuah karya jurnalisme pertama yang beredar di Indonesia adalah tulisan tangan berjudul *Memorie der Nouvelles* yang ditulis oleh Jan Pieterszoon Coen pada 1615 dan pada tahun 1717, Belanda mendatangkan mesin cetak lalu melahirkan surat kabar di Jakarta pada tahun 1776 dengan nama *Vendu News*. (Muhtadi, 2016:12-13).

Pulau Jawa menjadi pelopor berdirinya pers di Indonesia, karena pulau Jawa merupakan pusat daerah perlawanan bangsa penjajah dan mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bidang, diantaranya adalah jurnalisme. Beberapa surat kabar yang lahir diantaranya; *Soerabajaach Advertentieblad* di Surabaya tahun 1835, *Bataviasche Advertentieblad* di Jakarta tahun 1851, dan *Materiram* di Jogjakarta tahun 1885. Ketika beberapa media cetak di pulau Jawa tersebar luar diberbagai daerah besar di Indonesia, beberapa daerah lainnya turut meramaikan dengan memakai bahasa daerah seperti; *Soewara Oemoem*

menggunakan bahasa Jawa dan Madura di Surabaya, *Parahiyangan*, *Sipatahun* menggunakan bahasa Sunda, *Palito* di Batak dan lain sebagainya. Hal tersebut kemudian menjadi kemunculan pers di Sumatera seperti; *Sumatera Bode* pada tahun 1893, *Soematra Courant*, *Padangsche Handelsblad* berbahasa Belanda, dan lainnya (Hidayatullah, 2016:63-64).

Pers Indonesia lahir dari penderitaan dan tekanan terhadap rakyat, dalam perkembangannya pers Indonesia terbelakang oleh saingan pers Belanda dan Cina, karena kurangnya pendanaan dan sedikitnya penduduk pribumi yang bisa baca tulis dan karena tekanan dibawah pemerintahan jajahan Belanda. Pers Indonesia selama masa pergerakan terbukti cukup efektif mempengaruhi atau membentuk kesadaran kaum bumiputera sebagai rakyat terjajah. Pembentukan kesadaran ini diarahkan untuk menghimpun kekuatan rakyat guna menentang pemerintah kolonial. Pers di masa pergerakan juga sebagai pembawa suara bagi organisasi pergerakan. Tonggak jurnalistik modern bagi Bumiputera ditegakkan pertama kali oleh RM. Tirta Soerjo, seorang pemimpin redaksi Surat Kabar *Soenda berita*, ia adalah Bumiputera pertama yang mendirikan perusahaan penerbitan pers dan majalah mingguan *Medan Prijaji* (Achmad, 2014:27-28).

Dalam buku yang sama Achmad (2014:34) menyebutkan bahwa surat kabar Republik yang pertama adalah *Berita Indonesia* yang mulai terbit tanggal 6 September 1945. *Merdeka* mulai dicetak tanggal 1 Oktober 1945 dibawah pimpinan redaksi B.M. Diah. Di kota-kota lain pun

wartawan-wartawan Indonesia dengan segera mengambil alih. Bandung menyaksikan terbitnya *Soewara Merdeka*. Di Semarang terbit *Warta Indonesia*, di Surabaya terbit *Soewara Rakyat* dan di Yogyakarta terbit *Kedaulatan Rakyat*.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, surat kabar tumbuh seperti jamur. Selama dasawarsa 1950, jumlah media cetak terus menerus bertambah karena dipergunakan oleh partai-partai politik sebagai corong ideologinya. Surat kabar besar pada masa itu adalah *Harian Rakyat* (Partai Komunis Indonesia), *Pedoman* (Partai Sjarikat Islam), *Suluh Indonesia* (Partai Nasional Indonesia) dan *Abadi* (Masjumi). Pada masa pemerintahannya, presiden Soekarno menerapkan pers terpimpin. Surat kabar yang isinya tidak sesuai dan tidak sejalan dengan tujuan demokrasi terpimpin akan dibredel pada pemerintahan Orde Lama (Hidayatullah, 2016:66-67). Hal tersebut selaras dengan apa yang ditulis oleh Achmad (2014:62) yang menuliskan bahwa sejarah mencatat, kediktatoran Bung Karno di era orde lama semakin lengkap dengan memenjarakan tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh pers tanpa proses hokum dan membredeli berbagai penerbitan yang dianggap berlawanan dengan garis politik Nasakom.

Kegiatan pemberedelan yang dilakukan oleh setiap penguasa ini telah terjadi sejak Indonesia masih bernama Hindia Belanda, di mana pers “yang tidak bersahabat” akan mendapatkan sebuah ancaman untuk dideportasi dari Hindia Belanda. Hingga Indonesia memasuki rezim

otoriter di bawah naungan Soeharto, kegiatan pemberedelan terus terjadi. Semasa rezim otoriter berkuasa, negara terkesan sangat terobsesi untuk mengatur masyarakatnya. Jika diibaratkan negara adalah bapak, sementara masyarakat adalah anak. Dengan relasi semacam ini, penguasa bebas mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh rakyat. Tak terkecuali mengatur secara ketat informasi dan kebebasan pers (Utomo, 2016:92).

David T. Hill (2011:34) menuliskan, bahwa awal mula adanya “tangan besi legislatif” ditandai dengan munculnya Undang-undang (No.11) tahun 1966 tentang Prinsip-prinsip Dasar Pers. Landasan-landasan hukum ini muncul setelah adanya pergantian kekuasaan politik yang *chaos* pada 1 Oktober 1965 yang menyebabkan penutupan 46 dari 163 surat kabar yang diduga terkait atau menjadi simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Selama masa peralihan, para penerbit surat kabar wajib memiliki Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak (SIC) dari lembaga keamanan militer KOPKAMTIB. Kedua izin tersebut saling berkaitan, tanpa memiliki dua izin tersebut, sebuah media bisa dipastikan tidak dapat terbit secara hukum.

Departemen Penerangan pada bulan September 1982 mengubah SIT (Surat Ijin Terbit) dengan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers). Meskipun demikian, perubahan tersebut dinilai tidak berarti banyak bagi penerbitan. Pada akhirnya semua penerbitan pers tetap tunduk di bawah kuasa pemerintah. Palu beredel tetap menyentuh Sinar Harapan pada tahun

1986, Prioritas pada tahun 1987, juga Tempo, DeTIK, dan Editor. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashadi Siregar (2000:179) yang mengatakan bahwa pengendalian media massa oleh Orde Baru yang bersifat otoriter bukan semata-mata hanya untuk menguasai media-media tersebut. Lebih jauh dari itu, yakni untuk menguasai alam pikiran masyarakat yang kemudian hal tersebut dilakukan guna struktur negara yang bersifat monopolistis dapat berjalan. Pada akhirnya dengan kata lain, baik mekanisme melalui struktur gelap, maupun pengendalian media massa, itu semua dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Inge Hutagalung (2013:56-57) mengatakan bahwa tidak adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers membuat media di Indonesia pada rezim Orde Baru tidak pernah berhasil mengangkat dirinya sebagai pilar keempat demokrasi. Satu hal lainnya adalah struktur media itu sendiri yang dijadikan sebagai corong bagi kepentingan pemilik modal dan kelompok usahanya. Pemerintah orde baru menganggap pers yang bebas akan dapat mengganggu stabilitas negara, keamanan dan kepentingan umum, sehingga laju kebebasannya harus dikontrol dengan ketat. Oleh karenanya, akibat pengawasan dan pembredelan media yang dilakukan pemerintah menciptakan solidaritas dikalangan menengah, buruh, intelektual serta kaum pemodal yang semuanya bersatu dan menolak keberlangsungan pemerintahan Orde Baru.

Pada tahun 1998, lahir gerakan reformasi terhadap rezim Orde Baru. Keberhasilan gerakan ini melahirkan peraturan perundang-undangan

sebagai pengganti peraturan perundangan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, dengan adanya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menggantikan UU No. 21 Tahun 1984. Di dalam UU No. 40 Tahun 1999 tersebut, secara tegas dinyatakan mengenai dijaminnya kebebasan pers dan tidak adanya penyensoran, pemberedelan, dan lainnya. Bahkan juga ditiadakannya peran pemerintah untuk mengatur kehidupan pers tersebut (Susilastuti, 2000:228).

Namun keadaan pers Indonesia dimasa era reformasi saat ini adalah gambaran dari *a liberal-pluralis or marked model*, dimana isu-isu yang diliput oleh pers semakin beragam. Banyak bermunculan penerbitan baru baik dalam bentuk tabloid, majalah, surat kabar. Dari politik, ekonomi sampai yang berbau pornografi, kualitas penerbitannya pun beragam, dari yang bermutu, lumayan hingga yang berkualitas “sampah”. Oleh karenanya, peningkatan kuantitas media belum disertai dengan perbaikan kualitas jurnalisannya, serta terbius dengan euforia kebebasan dan memilih kepentingan komersial yang cenderung mengutamakan keuntungan (Hutagalung, 2013:57). Hal ini selaras dengan apa dikatakan oleh Nia Kurniati Syam (2006:75) bahwa sistem pers Pancasila yang dianut sekarang sepertinya menjadi bumerang bagi pers Indonesia. Keterkungkungan sikap dan ketidakberdayaan serta monotonitas isi pemberitaan sepertinya menjadi ciri khas pers Pancasila. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pers tidak berfungsi sebagaimana mestinya,

yakni sebagai kontrol sosial dan bukan alat penguasa serta berpihak pada pengusaha dan kelompok yang berkepentingan.

Spasialisasi horizontal muncul ketika pemilik modal menggabungkan berbagai jenis media dalam satu kontrol kepemilikan. Misalnya, pemilik media konvensional seperti surat kabar membeli televisi maupun media *online*. Atau juga sebaliknya. Hal ini bisa diperhatikan adanya fenomena konglomerasi kepemilikan media yang dilakukan oleh banyak pengusaha.. Sedangkan spasialisasi vertikal berjalan ketika pemilik media menggabungkan perusahaan dari berbagai jenis industri untuk mendapatkan kontrol atas proses produksi. Spasialisasi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berkali lipat sekaligus mengurangi ketidakpastian pasar yang bisa menghambat mekanisme produksi. Selain Media Group, contoh spasialisasi ini semakin gambling terlihat dalam industri media pasca tahun 1998 (Santoso & Sinaga, 2017:164).

Dalam penelitiannya, Ross Tapsell mengidentifikasi dan membahas delapan konglomerat digital utama di Indonesia. Delapan konglomerat media tersebut, ialah Chairul Tanjung, Hary Tanoesoedibjo, Eddy Sariaatmadja, James Riady, Jacob Oetama, Aburizal Bakrie, Dahlan Iskan, dan Surya Paloh. Melihat kecenderungan berita multiplatform, perusahaan-perusahaan media cetak di Indonesia juga berebut membeli atau membuat platform berbasis penyiaran dan infrastruktur komunikasi. Di era digital, perusahaan menganggap mereka perlu mempunyai portofolio multiplatform karena memungkinkan adanya promosi lintas

platform. Strategi ini dianggap memudahkan mereka merayu para pengiklan dibanding dengan perusahaan yang hanya mempunyai satu platform di pasar media (Tapsell, 2018:99).

Saat ini ada dua belas kelompok media besar mengendalikan hampir semua kanal media di Indonesia, termasuk di dalamnya penyiaran, media cetak dan media *online*. Mereka adalah MNC Group, Kelompok Kompas Gramedia, Elang Mahkota Teknologi, Visi Media Asia, Grup Jawa Pos, Mahaka Media, CT Group, BeritaSatu Media Holdings, Group Media, MRA Media, Femina Group dan Tempo Inti Media. Grup MNC memiliki tiga kanal televisi *free-to-air* – jumlah terbanyak yang dimiliki oleh grup media – juga 20 jaringan televisi lokal dan 22 jaringan radio di bawah anak perusahaan mereka, Sindo Radio. Grup Jawa Pos memiliki 171 perusahaan media cetak, termasuk di dalamnya Radar Grup. KOMPAS, surat kabar paling berpengaruh di Indonesia, telah mengekspansi jaringannya dengan mendirikan penyedia konten yaitu *KompasTV*, di samping 12 penyiaran radio di bawah anak perusahaan mereka Radio Sonora, dan 89 perusahaan media cetak lainnya. Visi Media Asia telah berkembang menjadi kelompok media yang kuat dengan dua saluran televisi teresterial (ANTV dan tvOne) serta media online yang berkembang dengan pesat *vivanews.com*. Sebuah perusahaan media di bawah Grup Lippo yakni Berita Satu Media Holding, telah mendirikan Internet Protocol Television (IPTV) BeritaSatuTV, kanal media online

beritasatu.com dan juga memiliki sejumlah surat kabar dan majalah (Nugroho dkk, dalam Santoso & Sinaga, 2017:165).

Konsentrasi industri media yang terjadi melalui merger dan akuisisi antar perusahaan- perusahaan media telah mengancam semangat ‘keragaman kepemilikan’ dan ‘keragaman informasi’ di media. Beberapa merger dan akuisisi penting telah terjadi baru-baru ini: Indosiar diakuisisi oleh Elang Mahkota Teknologi perusahaan holding dari SCTV; *detik.com* dibeli oleh CT Group, pemilik TransTV dan Trans7; sejumlah kanal televisi lokal juga diambil alih oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Kelompok MNC dengan jaringan *SindoTV* dan *Jawa Pos*, yang memiliki jaringan televisinya sendiri. Undang-Undang dan regulasi seperti ini tidak mempunyai gigi dalam mengendalikan konsentrasi kepemilikan (Nugroho dkk, dalam Santoso & Sinaga, 2017:167).

B. Rentetan Polemik PSSI di Media Massa

Dalam konteks pemberitaan mengenai polemik PSSI dibawah kepemimpinan Edy Rahmayadi pada akhir tahun 2018 sampai awal tahun 2019 selalu menjadi sorotan utama diberbagai surat kabar seperti surat kabar Jawa Pos dan Republika. Kasus-kasus seperti kekerasan suporter yang berujung pada kematian seperti Bani Rusman (Suporter Persija), Haringga Sirila (Suporter Persija) serta lainnya yang tak kunjung ada kejelasan dari PSSI dalam menuntaskan. Majunya Edy Rahmayadi dalam konstelasi pemilihan Gubernur Sumatera Utara menambah daftar panjang permasalahan, kemudian kegagalan Timnas Indonesia pada lanjutan Sea

Games serta tidak diperpanjangnya kontrak Luis Milla berakibat pada gagalnya Timnas Indonesia dalam Piala AFF 2018 yang hanya sampai tahap fase grup dengan menduduki peringkat 5. Terjadinya pengaturan skor (*match fixing*) dalam lanjutan Liga Indonesia yang menyeret para petinggi PSSI seperti komisi eksekutif dan komisi wasit, serta puncaknya adalah ketika Edy Rahmayadi memutuskan untuk mundur dari Ketua Umum PSSI saat Kongres tahunan PSSI yang diselenggarakan di Bali. Itu merupakan rentetan polemik yang terjadi pada PSSI pada akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019 yang menjadi sorotan, baik publik maupun berbagai surat kabar.

C. Profil Surat Kabar

1. JAWA POS

Jawa Pos merupakan surat kabar harian berskala nasional yang berpusat di Kota Surabaya, berbeda dengan surat kabar nasional lainnya yang kebanyakan berpusat di Jakarta. Cikal bakal berdirinya Jawa Pos dibuat oleh seorang pegawai bioskop di Surabaya bernama The Chung Shen. Tepat pada 1 Juli 1949 Djawa Post lahir dibawah naungan PT. Perusahaan Penerbitan dan Percetakan Djawa Post Concern Limited. Perkembangan Jawa Pos bukan tak ada kendala, pada tahun 1982 persaingan dengan surat kabar lain cukup ketat seperti dengan surat kabar Surabaya Post yang kala itu menguasai pasar di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kemudian Jawa Pos diambil alih oleh Eric F.H. Samola, Direktur Utama PT Grafiti Pers (penerbit

majalah Tempo), dan menunjuk Dahlan Iskan yang kala itu masih menjabat sebagai kepala biro Tempo di Surabaya untuk memimpin Jawa Pos yang pada saat itu hampir mati. Menurut Hermawan Kertajaya (2002:18) menjelaskan bahwa sebelum Dahlan Iskan masuk, Jawa Pos seperti tinggal menghitung hari. Tiras maupun iklannya terus merosot. Ekuitas merek koran yang didirikan The Chung Shen yang sempat menjadi raja media di Surabaya juga merosot. Rupanya kondisi semacam itu menjadi tantangan bagi Dahlan Iskan.

Dengan tangan dinginnya, Jawa Pos kembali bangkit dengan berbagai terobosan yang Dahlan Iskan lakukan seperti mengubah gaya bahasa yang sebelumnya formal dan kaku menjadi sedikit *suroboyonan* agar pembaca merasa dekat dengan dialek mereka sehari-hari, lalu karyawan Jawa Pos dan keluarganya diajak untuk menjadi distributor penjualan untuk memasarkan ke masyarakat luar, dan hasilnya dalam kurun waktu 5 tahun oplah dapat mencapai 300.000 eksemplar perhari dari yang sebelumnya hanya 6.000 eksemplar. Dan pada tahun 1992, Jawa Pos menjadi surat kabar ketiga terbesar di Indonesia dengan perkiraan sirkulasinya mencapai sekitar 350.000. Hill (2011:107) mengatakan, Jawa Pos menjadi contoh bagaimana “putra daerah” berhasil merebut pasar nasional. Kemudian, kelompok Jawa Pos membeli sejumlah saham beberapa media di daerah-daerah dan menjadi pemegang saham mayoritas seperti Mercusuar di Palu, Manado Post di Sulawesi Utara, Suara Maluku di Ambon,

Cendrawasih Pos di Jayapura, Batam Pos di Batam, Independent di Jambi, harian baru di Bengkulu (berdiri atas dukungan Surabaya Post, pesaing Jawa Pos) bernama Semarak, Manuntung di Balikpapan, Cahaya Siang di Manado, Fajar di Ujungpadang dan Akcaya di Pontianak.

Ross Tapsell (2018:64) mencatat bahwa keberhasilan Dahlan Iskan dalam merevitalisasi Jawa Pos yang berbasis di Surabaya pada tahun 1980-an membuat perusahaannya (grup Jawa Pos) meraup keuntungan sebesar AS\$2,8 juta pada tahun 1998. Model bisnis yang dilakukan oleh Dahlan Iskan adalah dengan membangun, membeli dan merawat surat kabar lokal dengan biaya rendah.

Roda estafet kepemimpinan Jawa Pos berpindah ke Azrul Ananda anak Dahlan Iskan pada tahun 2005, dan pada tahun 2010 Jawa Pos Group menciptakan 140 koran lokal diseluruh Indonesia, Jawa Pos Group kini menjadi konglomerat multiplatform dengan membentuk Jawa Pos News Network (JPNN). Kemudian jaringan ini merambah ke radio dan televisi sejak tahun 2002, pada tahun 2009 telah memiliki 15 stasiun televisi lokal seperti Batam TV, Riau TV, Palembang TV, Radar Cirebon TV, dll. Pada tahun 2014, dibawah perusahaan induk baru Jawa Pos Media Corporation, jumlahnya naik menjadi 22, meliputi beberapa perusahaan media lokal di beberapa provinsi (Tapsell, 2018:96).

2. REPUBLIKA

Republika merupakan surat kabar yang lahir sebelum era reformasi atas ide dari kalangan komunitas muslim, sehingga tidak mengherankan jika Republika dianggap sebagai surat kabar yang beraromakan Islam dan dianggap sebagai surat kabar yang merepresentasikan kepentingan kaum muslim. Republika terbit pertama kali pada tanggal 4 Januari 1993 di Jakarta. Terbitnya Republika tidak bisa dilepaskan dari organisasi ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) melalui Yayasan Abdi Bangsa yang diketuai oleh B.J. Habibie dan dimiliki oleh PT. Abdi Bangsa. Berkat dukungan dari ICMI, SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) bisa didapatkan oleh Republika tanpa kendala (Hill, 2011:155).

Dalam menjalankan usahanya untuk menciptakan surat kabar yang “berkualitas”, Republika menggolong sejumlah intelektual dan jurnalis Islam liberal yang paling berpengaruh di negeri ini. Dalam memilih liputan peristiwa dan masalah yang diangkat, Republika tergolong sekuler. Meski demikian, harian ini secara ideologis menginformasikan nilai-nilai islami layaknya Kompas atau Suara Pembaruan dengan muatan Kristianinya (Hill, 2011:155). Oleh karenanya paa saat pertama kali Republika lahir Pemimpin Umum dan Kepala Redaksi dipercayakan kepada Parni Hadi, Pemimpin Perusahaan dipercayakan kepada Ir. Haidar Bagir, M.A, untuk Pengelolaan Redaksi dipercayakan kepada Dr. Sinansari S. Encip dan

Zaim Uchrowi. Sementara Dewan Redaksi diisi oleh para tokoh nasional seperti, Soetjipto Wirasardjono, M.Sc, Prof. Dr. Edy Sedyawati, Prof. Dr. Quraish Shihab, Dr, Nurcholis Madjid, Dr. Amien Rais dan Adi Sasono (Hasrullah, 2001:17).

Ross Tapsell (2018:106) mencatat, bahwa pada tahun 2001 Republika dibeli oleh seorang pengusaha yaitu Erick Thohir. Lalu membeli Harian Sin Chew Indonesia, majalah-majalah olahraga serta gaya hidup dan media berbahasa mandarin, kemudian mendirikan perusahaan bernama Mahaka Group. Erick Thohir juga memiliki saham Visi News Asian milik Bakrie Group, hal ini membuat portofolio media miliknya terhubung dengan sebuah konglomerat digital.

Banyak yang mempertanyakan Thohir sebagai pemilik Republika, karena kalangan Islam memandang Thohir sebagai simbol yang sebenarnya dilawan oleh media Islam di Indonesia, yaitu raja media yang kapitalis, sekuler, kosmopolit. Meskipun demikian, dengan adanya koneksi bisnis yang dimilikinya, Thohir tetap mampu membuat Republika bertahan sampai di era digital. Republika bergerak membuat stasiun televisikabel, Alif TV, melalui Transvision, membangun ROL (Republika Online) dan mempunyai konten video di YouTube (Tapsell, 2018:107).